

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Oleh:
Vini Septika Mega Sari
NIM. E42011006

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2015

E-mail: vini_septika@yahoo.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak belum terlaksana dengan optimal. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan implementasi KPE di Kota Pontianak belum berjalan optimal sesuai dengan Peraturan BKN No.7 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan subjek penelitian implementor program KPE di Kota Pontianak.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, kurang optimalnya implementasi program KPE di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak karena jumlah staf yang hanya 3 (tiga) orang saja sebagai petugas dari pelayanan KPE di Kota Pontianak, kurangnya sosialisasi tentang penggunaan KPE di Kota Pontianak, mesin atm khusus KPE yang sampai saat ini belum ada di Kota Pontianak serta kurangnya komunikasi antara BKD Kota Pontianak dengan BKN dan Pegawai yang ada di Kota Pontianak. Untuk itu rekomendasi kebijakan adalah memperlancar komunikasi antara pihak-pihak yang terkait di dalam implementasi KPE di Kota Pontianak, menambah jumlah petugas yang mengurus permasalahan KPE, mengadakan sosialisasi agar seluruh pegawai di Kota Pontianak mengetahui fungsi dan bagaimana penggunaan KPE di Kota Pontianak.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kartu PNS Elektronik, Pegawai

THE IMPLEMENTATION OF CIVIL SERVANT ELECTRONIC CARD (KPE) IN THE REGIONAL EMPLOYMENT BOARD PONTIANAK (BKD)

Abstract

The writing of this thesis is aimed to identify the factors that caused the implementation of Civil Servant Electronic Card or in Indonesia called as Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) in the Regional Employment Board Pontianak City (BKD) could not optimally be done. The writing of this thesis is based on the problems of the implementation of the KPE in Pontianak which has not run optimally in accordance with the regulations of BKN No. 7 year 2008. This research is a qualitative research with the implementer of the KPE program in Pontianak as its samples.

Conclusion in this research is, the suboptimal implementation of the KPE program in the Regional Employment Board Pontianak is because there are only 3 people as the staffs to serve in KPE program in Pontianak City, the lack of socialization about the use of the KPE in Pontianak City, there hasn't been special ATM machine for KPE in Pontianak City, and the lack of communication between the Regional Employment Board Pontianak City with the National Employment Board and the employees in Pontianak City. Some policies that are recommended to solve the communication problems in the implementation of KPE is, adding more staff to handle the KPE and perform the socialization about KPE so all employees in Pontianak City get the function and the using of KPE in Pontianak.

Keywords: Implementation, Civil Servant Electronic Card, Employee

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pegawai Negeri Sipil atau *Civil Servant* merupakan salah satu organ penting bagi eksistensi suatu negara, keberadaan Pegawai Negeri Sipil selain sebagai bagian dari eksekutif juga terdapat pada organ-organ kenegaraan lainnya seperti lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif. PNS dituntut untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, untuk menunjang kinerja yang lebih optimal maka pemerintah memberikan fasilitas melalui program Kartu PNS Elektronik kepada Pegawai Negeri Sipil. KPE merupakan Kartu identitas PNS yang memuat data Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya secara elektronik. KPE diterbitkan sebagai pengganti kartu pegawai untuk memudahkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun PNS dan keluarganya. Berdasarkan dari Peraturan Kepala BKN No.7 pasal 8 Tahun 2008 pelayanan KPE meliputi layanan berupa gaji, kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi keuangan/perbankan dan layanan lainnya.

Berdasarkan keadaan di lapangan, peneliti menemukan bahwa di Kota Pontianak, pegawai yang memiliki KPE belum sepenuhnya merasakan fungsi KPE

yang telah dicantumkan pada Pasal 8 tersebut. Fungsi KPE di Kota Pontianak hanyalah sebagai alat untuk mengambil gaji. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan BKN No.7 tahun 2008, yang seharusnya manfaat dari KPE tersebut bisa dirasakan semua masyarakat Indonesia tetapi di Kota Pontianak belum optimal. KPE mulai diberlakukan di Kota Pontianak sejak tahun 2011 dan sampai saat ini juga belum ada kejelasan mengapa peraturan BKN No.7 tahun 2008 tersebut belum dapat dilaksanakan di Kota Pontianak. Selain itu, data yang peneliti dapatkan dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak ialah masih ada sekitar 25% pegawai Pemkot Pontianak yang belum mendapatkan KPE hingga saat ini.

Selain itu, berdasarkan keadaan di lapangan juga ditemukan beberapa kendala terkait implementasi Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) di Kota Pontianak diantaranya belum adanya mesin atm khusus untuk penggunaan KPE di SKPD yang ada di Kota Pontianak sehingga fungsi-fungsi yang ada di dalam Peraturan BKN No.7 tahun 2008 belum dapat terlaksana dengan optimal. Selanjutnya, belum ada sosialisasi tentang fungsi dari KPE yang menyebabkan pegawai di Kota Pontianak belum mengetahui mengapa dan apa fungsi KPE

dikeluarkan serta bagaimana cara penggunaan dan cara pengajuan KPE baru jika KPE mengalami masalah juga belum diberitahukan kepada pegawai yang ada di Kota Pontianak. Hal tersebut tentunya dapat menghambat implementasi KPE yang ada di Kota Pontianak karena masih belum ada kesiapan dari segi sumber daya maupun informasi tentang pentingnya Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik untuk digunakan di Kota Pontianak.

Berangkat dari data dan keadaan di lapangan yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Program Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak*".

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti melihat beberapa masalah terkait Implementasi program Kartu PNS Elektronik di BKD Kota Pontianak, yaitu implementasi program KPE di BKD Kota Pontianak belum berhasil dilihat dari fungsi KPE berdasarkan peraturan kepala BKN No.7 tahun 2008 tidak terlaksana

3. Fokus penelitian

Agar penulisan ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KPE di Badan Kepegawaian Kota Pontianak.

4. Rumusan Permasalahan

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan implementasi program Kartu PNS Elektronik (KPE) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak belum berhasil ?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program Kartu PNS Elektronik (KPE) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum terlaksana dengan optimal.

6. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan dibidang implementasi kebijakan publik.

b) Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan untuk Badan
Kepegawaian Daerah Kota Pontianak.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sedangkan implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan maka ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Seperti dalam pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

- Komunikasi
- Sumber Daya
- Disposisi
- Struktur Birokrasi

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi serta mendeskripsikan hal-hal yang mendalam mengenai implementasi program Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) di BKD Kota Pontianak

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi untuk mengamati secara langsung fenomena maupun kondisi real yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan implementasi KPE di BKD Kota Pontianak dengan menggunakan instrument yaitu checklist dan kamera. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab yang berkaitan dengan implementasi program KPE di BKD Kota Pontianak, dilakukan dengan implementor dan target groups dari program KPE ini. instrument yang digunakan ialah pedoman wawancara dan tape recorder. Selanjutnya dokumentasi, yaitu data atau informasi yang berkaitan dengan Data PNS pengguna KPE, MOU program KPE dan SOP program KPE.

Teknik Analisis Data dijabarkan dalam tiga langkah yaitu Reduksi Data berguna untuk merangkum semua data yang diperoleh memilih dan memfokuskan kepada hal penting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya penyajian data setelah data tersebut di reduksi, yang mana penyajian data ini dapat berupa gambar agar lebih mudah untuk difahami. Setelah itu, dibuat kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber dan teknik. Hal ini dimaksudkan agar tercapai titik jenuh dalam pengumpulan data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selama penelitian berlangsung, peneliti telah mendapatkan data primer maupun sekunder yang kemudian peneliti menganalisis serta menguji keabsahan datanya. Adapun hasil penelitian ini, peneliti mendeskripsikan berdasarkan empat faktor, yaitu :

1) Komunikasi

Komunikasi terdiri dari beberapa indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi disini menyangkut banyaknya penyampaian kepada banyaknya hirarki birokrasi sehingga biasanya banyak terjadi distorsi dan mengakibatkan komunikasi langsung tidak berjalan efektif. Miskomunikasi sering terjadi disini baik itu antara petugas dengan pengguna KPE, ataupun petugas dengan pihak-pihak yang berwenang lainnya. Kejelasan yakni perintah yang diberikan harus dirincikan kapan atau bagaimana sebuah program dilakukan. Hal ini tidak terdapat masalah. Selanjutnya konsistensi yaitu program yang berjalan harus sesuai dengan petunjuk yang konsisten dalam pelaksanaannya.

2) Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Staf yang cukup memadai dan berkualitas dibidangnya tentulah dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Sedangkan informasi ialah berkenaan dengan bagaimana melakukan sebuah kebijakan dan data dalam bentuk peraturan pemerintah. Selain itu pula disebutkan bahwa wewenang juga harus jelas dan telah memiliki batas-batas yang telah ditentukan

yang mana saja menjadi wewenang dari implementor yang mana yang bukan menjadi wewenangnya. Ketersediaannya fasilitas ataupun segala macam peralatan yang dapat menunjang suatu kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik juga menjadi sangat penting.

Adapun beberapa kendala yang ditemui yaitu keterbatasannya staf yang menangani masalah KPE yakni berjumlah 3 orang saja untuk menangani 6861 orang PNS di Kota Pontianak. Sedangkan dari indikator informasi, ditemukan pula kendala yaitu kurangnya sosialisasi terhadap penggunaan KPE. Pada indikator wewenang, peneliti melihat bahwa wewenang yang diberikan telah jelas dan terdapat diperaturan tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas wewenang tersebut. Dari poin fasilitas, peneliti menemukan titik terang mengapa fungsi dari KPE hingga saat ini belum dapat berjalan optimal di Kota Pontianak, hal ini dikarenakan belum adanya mesin atm khusus yang telah dijanjikan dari beberapa tahun yang lalu sehingga fungsi-fungsi dari KPE belum dapat dilaksanakan seutuhnya di Kota Pontianak.

3) Disposisi

Pada Faktor disposisi memiliki indikator penilaian dari pengangkatan

birokrasi yakni pemilihan personel pelaksana kebijakan ialah harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan dalam hal insentif yaitu dengan tambahan biaya tertentu mungkin akan menjadi pendorong yang membuat para pelaksana menajalankan perintah dengan baik.

Pada pengangkatan birokrasi, peneliti melihat telah baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan untuk masalah intensif untuk menunjang kinerja yang lebih baik, Pemerintah Kota Pontianak memberikan sejumlah uang kepada tim yang terlibat sebesar 300-400ribu per orang. Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa pada faktor disposisi tidak ditemui permasalahan.

4) Struktur Birokrasi

Pada faktor struktur birokrasi ini menyangkut dua hal yang diteliti yaitu SOP dan Fragmentasi. SOP disini dimaksudkan agar lebih mempermudah pelayanan KPE baik melayani KPE yang bermasalah maupun pengajuan KPE baru bagi CPNS Kota Pontianak, menghemat waktu dan sumber daya. Sedangkan fragmentasi yakni berkenaan dengan pembagian tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berwenang.

Hasil penelitian di dapatkan bahwa SOP yang ada di BKD Kota Pontianak sudah jelas dan dapat dengan mudah di dapatkan jika pegawai yang ingin mengurus KPE langsung bertanya kepada petugas. Sedangkan pada poin fragmentasi tidak ditemui kendala karena setiap individu yang bertugas telah mengetahui apa-apa saja yang telah menjadi tanggung jawab mereka dan siap untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya mereka.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Pada point komunikasi, terdapat tiga penilaian yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan informasi yang disampaikan terlalu banyak hirarki birokrasinya sehingga tentunya tetap pernah terjadi miskomunikasi didalam proses implementasi KPE di Kota Pontianak karena jika kita perhatikan birokrasi yang ada dalam implementasi KPE ini berbelit-belit. Selanjutnya pada poin kejelasan, BKD Kota Pontianak mengakui telah jelas atas semua peraturan yang dikeluarkan BKN berhubungan

dengan pelaksanaan KPE di Kota Pontianak. Terakhir, berhubungan dengan konsistensi suatu program dalam penelitian ini ialah program KPE yang dikeluarkan oleh BKN, masyarakat menilai telah baik adanya KPE dan harus tetap dilanjutkan tetapi harus dilakukan evaluasi untuk memperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang baik, sebagai contoh evaluasi dalam penggunaan fungsi KPE yang sampai saat ini Peraturan BKN No.7 tahun 2008 belum bisa diterapkan seluruhnya di Kota Pontianak.

2. Pada faktor sumber daya ditemui beberapa masalah yakni dari jumlah staf yang kurang disertai dengan dualisme pekerjaan dalam satu bidang, adapun staf yang menangani KPE di Kota Pontianak ialah 2 orang yang dikepalai oleh 1 orang sehingga totalnya ialah 3 orang. Dari jumlah tersebut tentunya tidak memadai untuk menangani pegawai Kota Pontianak yang berjumlah 6861 orang. Selanjutnya pada poin informasi, sosialisasi yang berkaitan tentang penyampaian penggunaan KPE dan fungsinya kepada pegawai Pemkot Pontianak belum pernah

dilakukan. Pada poin fasilitas, masih sangat minim sehingga fungsi yang ada di KPE yang sesuai dengan peraturan BKN No.7 tahun 2008 belum bisa dilaksanakan seluruhnya di Kota Pontianak. Pada poin wewenang tidak ditemui permasalahan karena BKD Kota Pontianak telah berpedoman pada MOU, sehingga seluruh prosedur kerja serta batasan-batasan kerjaan telah mereka ketahui dan mereka patuhi.

3. Pada faktor disposisi, dua poin penilaian yaitu pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif. Pada poin pengangkatan birokrasi ditemui kendala tetapi tidak terlalu berpengaruh yaitu penunjukan petugas KPE yang tidak melewati seleksi melainkan hanya kebetulan saja ketika KPE berlaku di Kota Pontianak. Sedangkan pada poin pemberian insentif kepada petugas yang menangani KPE tidak ditemui masalah.

4. Struktur birokrasi sudah baik dan tidak ditemui masalah. SOP yang sudah jelas serta pembagian tanggung jawab kepada tiap-tiap badan yang berwenang telah sesuai

dengan peraturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan pekerjaan yang telah dilakukannya. Fragmentasi yang ada telah baik, BKD Kota Pontianak juga telah mengetahui apa saja yang harus dikerjakannya terkait dengan pelayanan yang menyangkut Program KPE di Kota Pontianak dengan berpedoman pada MOU serta bisa dipertanggung jawabkan kinerjanya.

b. Saran

1. BKD harus aktif berkoordinasi dengan BKN agar implementasi KPE yang ada di Kota Pontianak dapat berjalan seperti peraturan BKN No.7 tahun 2008. BKD harus bisa menambah jadwal kunjungan kepada BKN yang semula setahun 2 kali menjadi setahun 5 kali dan yang dibicarakan bukan hanya menyangkut permohonan KPE yang baru saja melainkan selalu bertanya kapan fungsi KPE yang ada pada peraturan BKN No.7 tahun 2008 dapat diterapkan di Kota Pontianak seperti yang telah diterapkan di Jakarta ataupun Pulau Jawa.
2. BKD harus mengadakan sosialisasi tentang penggunaan KPE dan fungsi yang ada di KPE agar PNS Pemkot

Pontianak mengetahuinya dan mendukung adanya KPE ini untuk diterapkan di Kota Pontianak, bukan hanya melayangkan surat kepada kepala SKPD ataupun kasi untuk disebarluaskan kepada pegawai yang ada di SKPD nya, karena hal tersebut tidak efektif dan hanya segelintir orang saja yang tahu akan fungsi dari KPE ini. Jadi, seharusnya BKD Kota Pontianak membuat sosialisasi khusus kepada seluruh pegawai yang ada di Kota Pontianak dengan jadwal beberapa hari yang memang dikhususkan untuk membahas semua tentang Kartu PNS Elektronik serta fungsi dan tata cara penggunaannya di Kota Pontianak.

3. Menambah petugas KPE, karena 3 orang saja tidak cukup untuk menangani 6861 orang PNS yang ada di Kota Pontianak. Seperti yang telah dijelaskan di bab pembahasan bahwa petugas yang melayani untuk masalah KPE ini hanya 2 orang dan 1 kasi dari subbidang Analisis Kepegawaian dan Dokumentasi maka penambahan petugas dikira perlu, baik itu untuk yang melayani di meja pelayanan, yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak-

pihak yang berwenang terkait dengan program KPE di Kota Pontianak, yang merekap semua administrasi pegawai Kota Pontianak yang mengajukan KPE dan yang belum mendapatkan KPE, serta penanggung jawab atas program KPE di Kota Pontianak.

4. SOP diperbesar di depan pintu BKD Kota Pontianak agar setiap pegawai Kota Pontianak yang mengalami masalah dengan KPE mengetahui dengan jelas alur dan proses pengajuan KPE sehingga tidak ada yang salah pengertian lagi mengenai tempat pengurusan KPE dan syarat-syarat yang harus dilengkapi khusus yang menjadi pegawai di Kota Pontianak.
5. Realisasi mesin atm khusus di setiap SKPD ataupun di BKD Kota Pontianak harus ada agar lebih mempermudah PNS Kota Pontianak menggunakan fungsi-fungsi KPE yang ada di dalam peraturan BKN No.7 tahun 2008.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdullah, M.Sy. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action*

Research and Case Studies). Jakarta :
lembaga Administrasi Negara.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
2011. *Standar Operasional Prosedur Implementasi Kartu Pegawai Elektronik*. Jakarta: BKN

Dunn, William N. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

Purwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gavamedia.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : APII.

Winarno, B. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

-----, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura*. Pontianak : program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Skripsi

Hidayat. 2013. *Pengaruh Komunikasi Terhadap Implementasi Kebijakan Akta Kelahiran di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Kabupaten Ketapang*. Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Mardiani, Irda Ella. 2014. *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Sutra Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Puspita, Henny. 2014. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan di Desa Sungai Awan Kiri Kabupaten Ketapang*. Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sindy, Joan Ria. 2014. *Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Umuhabibah, Nurul. 2014. *Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi*. Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sumber Peraturan / Undang-undang :

Buku Tamu BKD Kota Pontianak tentang Perbaikan KPE tahun 2013-2014

Peraturan Kepala BKN No.7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik.

Perjanjian Kerjasama Antara Pemkot Pontianak dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tentang Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik.

Profil Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak tahun 2013

Rujukan Elektronik

Abidin, Zainal., 2010, *Pengertian Kebijakan Publik*, Melalui <http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-kebijakan-publik.html>





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage :<http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Vini Septika Mega Sari
NIM / Periode Lulus : E42011006 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / IIP : vini_septika@yahoo.com / 089635150258

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE) DI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

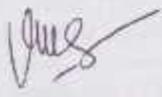
- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Agustus 2015


(Vini Septika Mega Sari)

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP

KERJASAMA
Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001
